



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TATHIT SURYA ARJANGGI
2. Jabatan : SENIOR PROJECT MANAGER
3. NHK : 419715

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.519.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 66.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 73.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 23 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 23 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/12 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, WARISAN Rp. 150.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 7 m2/7 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 333.021.576**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
2. LAINNYA, LANKELEISI G660 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 16.021.576
3. LAINNYA, POLYGON 4.0 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000



4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
35.000.000
5. LAINNYA, LANKELEISEI ROADBIKE Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 265.736.385

D. SURAT BERHARGA Rp. 356.310.227

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 65.950.296

F. HARTA LAINNYA Rp. 205.915.792

Sub Total Rp. 2.746.434.276

III. HUTANG Rp. 439.312.134

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.307.122.142

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.